

**Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita Di
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat**
*Effort To Manage Stunting In Children In Solok Regency, West Sumatera
Province*

Rizqa Inatsaa Septivani, Ditha Arsyia Arshita, Alvien Adiwidya Permana
Universitas Hang Tuah

Email: Rizqainatsaa2004@gmail.com; Ditha.arsya@gmail.com; Permanaalvien554@gmail.com

ABSTRACT

The problem of stunting is still a serious concern in Indonesia, including in West Sumatra Province. Data from Riskesdas 2018 revealed that the prevalence for short and very short children under five in West Sumatra is 30%, and was close to the national prevalence (30.8%). This study aims to describe the sociocultural problems, local potential, and formulate alternative policies in effort to prevent and control stunting in children under five in Solok Regency. The research design used qualitative methods. Primary data collection was carried out by in-depth interviews and observations. The technique of selecting informants was done purposively. The results of the study revealed that the socio-cultural problems in efforts to prevent and control stunting in toddlers are still limited public knowledge about the causes and efforts to prevent stunting, inadequate understanding of the importance of balanced nutritional needs, and the behavior, parenting patterns, and feeding habits of toddlers who does not support the prevention and control of stunting in children under five. It is recommended that there should be alternative policies and action plans for stunting prevention, among others, by increasing knowledge through socialization about the risk of stunting on children's intelligence, increase participation and community empowerment for stunting prevention by utilizing the local potential such as curd and bilih fish in Solok Regency, West Sumatra Province.

Keywords: Socio-culture, stunting, toddlers, policies, local potentia

ABSTRAK

Permasalahan stunting masih menjadi perhatian yang serius di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil data Riskesdas tahun 2018 mengungkapkan bahwa data prevalensi pendek dan sangat pendek pada balita di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 30%, dan mendekati prevalensi nasional (30,8%). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang permasalahan sosial budaya, potensi lokal, dan merumuskan alternatif kebijakan dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi stunting pada balita di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi. Teknik pemilihan informan ini dilakukan secara purposive. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa permasalahan sosial budaya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting pada balita adalah masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang penyebab dan upaya pencegahan stunting, belum memadainya pemahaman tentang pentingnya kebutuhan gizi yang seimbang, dan adanya perilaku, pola asuh serta kebiasaan pemberian makanan pada balita yang kurang mendukung upaya pencegahan serta penanggulangan stunting pada balita. Disarankan perlu adanya alternatif kebijakan dan rencana aksi penanggulangan stunting yaitu antara lain dengan peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi tentang risiko stunting terhadap kecerdasan anak balita, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan stunting dengan memanfaatkan potensi lokal seperti dadih dan ikan bilih di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Kata kunci: Sosial budaya, stunting, balita, kebijakan, potensi lokal

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi di Indonesia. Berdasarkan data prevalensi balita *stunting* yang dihimpun *World Health Organization* (WHO) terungkap bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita *stunting* di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4 persen (Saputri & Tumangger, 2019). Selanjutnya berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 bahwa prevalensi anak balita *stunting* di Indonesia sebesar 37,2 persen (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013), dan data prevalensi anak balita *stunting* di Indonesia dari hasil Riskesdas tahun 2018 adalah sebesar 30,8 persen (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019).

Permasalahan *stunting* pada balita juga masih menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera. Data prevalensi balita pendek dan sangat pendek pada balita di Sumatera Barat berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 adalah sebesar 39,24 persen, yang melebihi prevalensi nasional (37,21%) (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). Selanjutnya dari data hasil Riskesdas tahun 2018 diketahui bahwa data prevalensi balita pendek dan sangat pendek di Sumatera Barat sebesar 30 persen dan mendekati prevalensi nasional yang sebesar 30,8 persen (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019). Kriteria prevalensi yang dianggap berat menurut WHO adalah bila prevalensi pendek sebesar 30-39 persen dan serius bila prevalensi pendek ≥ 40 persen. Kemudian berdasarkan data gambaran status Gizi Balita di Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari pemantauan status gizi tahun 2015-2017 diketahui bahwa persentase balita yang masuk kategori pendek dan sangat pendek berdasarkan TB/U mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 30,6 persen, sedangkan sebelumnya sebesar 29,0 persen (2015), dan 27,5 persen (2016) (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2018).

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang persentase balita kategori pendek dan sangat pendek berdasarkan TB/U termasuk tinggi yaitu sebesar 39,9 persen pada tahun 2017 (peringkat kedua tertinggi), dan di atas rata-rata Sumatera Barat (30,9%) serta di atas rata-rata Nasional (29,6%) (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2018). Selanjutnya berdasarkan data hasil pemantauan Status Gizi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok diketahui bahwa persentase balita sangat pendek dan pendek (*stunting*) di Kabupaten Solok tahun 2018 adalah sebesar 30,5 persen (Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, 2018).

Permasalahan *stunting* pada anak balita merupakan konsekuensi dari beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan kemiskinan termasuk gizi, kesehatan, sanitasi dan lingkungan. Ada lima faktor utama penyebab *stunting* yaitu kemiskinan, sosial dan budaya, peningkatan paparan terhadap penyakit infeksi, kerawanan pangan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Aridiyah et al., 2015). Faktor sosial dan budaya antara lain meliputi pengetahuan masyarakat tentang *stunting*, pola asuh, perilaku/praktek dan kebiasaan pemberian makanan pada balita. Ada beberapa faktor penyebab masih tingginya kejadian *stunting* diantaranya adalah penyebab langsung karena kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Di samping itu, faktor lainnya adalah kurangnya pengetahuan ibu, adanya kesalahan dalam pola asuh, sanitasi yang kurang memadai dan belum memadainya pelayanan kesehatan serta masyarakat belum menyadari jika anak pendek merupakan masalah (Mitra, 2015). Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian *stunting* diantaranya terkait dengan tingkat pendidikan ibu, pengetahuan ibu tentang gizi, pemberian ASI Eksklusif dan umur pemberian makanan pendamping ASI (Aridiyah et al., 2015).

Permasalahan atau hambatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* tidak terlepas dari faktor-faktor sosial budaya dan lingkungan dalam masyarakat mereka berada, yang antara lain meliputi pengetahuan budaya dari masyarakat tertentu, adanya kebiasaan dan ketidaktahuan masyarakat yang bisa berdampak terhadap status gizi anak balita. Sehubungan dengan hal ini tujuan penulisan adalah untuk mendeskripsikan permasalahan sosial budaya, potensi lokal dan merumuskan alternatif kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* pada balita di Kabupaten Solok. Artikel ini didasarkan

pada hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Permasalahan Sosial Budaya Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita”.

Stunting merupakan permasalahan kekurangan gizi kronis yang di sebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam kurun waktu yang cukup lama yang diakibatkan oleh pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kejadian stunting bisa terjadi dimulai dari saat janin masih dalam kandungan dan baru terlihat ketika anak berusia dua tahun (Kementrian Kesehatan, 2016). Beragam permasalahan seperti masalah kemiskinan, tingkat pengetahuan, pola asuh anak, kejadian bencana alam, ketersediaan pangan rendah, dan keberadaan pelayanan kesehatan bersumber pada permasalahan kebijakan ekonomi dan politik suatu negara merupakan masalah utama. permasalahan tersebut kemudian akan berdampak pada kurangnya asupan zat gizi balita dan penyakit infeksi (Kementrian Kesehatan, 2020).

Stunting merupakan menjadi salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi di Indonesia. Berdasarkan data prevelensi balita stunting yang dihimpun WHO (World Health Organization) terungkap bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevelensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Indonesia sendiri pada tahun 2-19 mencatat terdapat 29,5% bayi lahir dengan kondisi prematur, dan 6,2% bayi lahir dengan kondisi berat endah. Golongan tersebut cenderung bisa masuk kedalam kategori anak yang akan mendapatkan gangguan pertumbuhan terutama stunting dan gangguan intelektual bahkan resiko kematian (Gunardi, 2021). Indonesia sedang mengalami bonus demografi dimana akan mencapai puncak keberhasilan pada tahun 2045, untuk itu pemerintah berupaya mengeluarkan kebijakan dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten/Kota.

Provinsi Sumatra Barat berada pada urutan ke-17 dari 34 provinsi stunting di Indonesia dengan prevalensi balita (usia 24-59 bulan) stunting sebesar 36,2% lebih tinggi dari prevalensi nasional yaitu 35,3%. Prevalensi stunting ini bisa saka meningkat jika faktor-faktor dari penyebab stunting tidak diperhatikan. Peranan dari keluarga atau pola asuh dari ibu tentang bagaimana pola gizi yang baik untuk pertumbuhan anaknya. Sanitasi lingkungan juga berpengaruh terhadap permasalahan stunting ini. Sanitasi lingkungan yang kurang baik memiliki resiko yang tinggi terhadap penyebab terjadinya stunting (Anggraini & Rusdy, 2019)

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2019, ditetapkan bahwa Kabupaten Solok menjadi lokus stunting di Sumatra Barat. Kabupaten Solok menempati urutan ketiga jumlah penderita stunting terbanyak di Sumatra Barat, setelah Pasanam dan Pasanam Barat. Tentunya hal ini menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Solok untuk menurunkan jumlah penderita stunting. Pemerintah juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk mengurangi jumlah penderita stunting. Disebabkan karena tingginya angka stunting di Kabupaten Solok, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, kemudian menetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting. Kurangnya konsisten pemerintah sehingga pelaksanaan pencegahan masih belum maksimal, program yang dilakukan masih baru dan belum sepenuhnya terlaksana, pelaksanaan yang belum optimal karena adanya kasus baru yang masuk ke Indonesia yaitu Covid-19 menjadikan keterbatasan kinerja lembaga daerah. Permasalahn di atas menyebabkan sulitnya mencapai keberhasilan dalam mewujudkan tujuan kebijakan penurunan atunting di Kabupaten Solok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur melalui dari beberapa sumber. Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Solok Sumatera Barat. Alasannya karena daerah ini tergolong kedalam wilayah dengan jumlah penderita *stunting* terbanyak di Kabupaten Solok bagia barat. Untuk memperoleh hasil temuan penelitian ini mengandalkan data primer dan data sekunder. Pengumpulan informasi data terkait kebijakan dalam upaya penanggulangan stunting pada balita di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang di ambil dari jurnal jurnal terdahulu yang kemudian di ringkas menjadi satu sehingga menjadi sebuah artikel

Teori Sosial Makro

Defenisi dari teori sosial makro adalah teori yang memperlakukan kajian – kajiannya pada struktur sosial dan pranata sosial. Konsep teoritis yang melakukan kajian mengenai karakteristik umum masyarakat (Trisni Andayani, 2020). Asumsi dasar teori ini yaitu beranggapan bahwa masyarakat merupakan entitas keseluruhan (makro), dan bukan sebagai individu maupun komunitas sosial (kumpulan individu). Teori sosial makro memiliki corak analisis yang sangat terlihat secara gamblang, yakni melakukan proses analisis berskala besar dan jangka panjang. Di lain sisi teori ini diasosiasikan dengan metodologi penelitian kuantitatif dengan logika deduktif yang sangat menekankan pada objektivitas.

Makro adalah bagian paling besar dan berada secara global atau umum. Cakupannya tidak hanya pada masyarakat di satu tempat saja, melainkan bisa menjangkau secara lebih luas misalnya suatu negara atau komunitas dunia. Hal inilah yang menjadikan efek yang berpengaruh sangat besar terhadap perubahan-perubahan individu dan masyarakat.

Teori sosial makro menurut para ahli:

1. Aristoteles

Aristoteles dalam Teori KOINONIA dan PIOLIS (Campbell, 1981)

Menurut Aristoteles, kemampuan manusia meliputi keinginan untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Sedangkan manusia atau masyarakat tidak dapat di pisahkan dengan keberadaan negara. Oleh karena itu, Aristoteles mengistilahkan masyarakat dengan Piolis dengan mengartikan komunitas sipil sebagai sosial kodrati dari individu. Selanjutnya kelompok sebagai Kiononia yang meliputi dimensi komunitas atau kelompok. Kelompok terkecil yaitu keluarga, kumpulan keluarga yang didasarkan kebutuhan kemudian menjadi desa. Selanjutnya, Aristoteles menyebut Piolis sebagai kumpulan desa (yang di dalamnya terdiri dari komunitas) yang tidak hanya menjamin keamanan, melainkan juga mempermudah perdagangan.

2. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes dalam teori NATURALIS (Campbell, 1981)

Thomas Hobbes mengungkapkan, dalam teori Naturalis bahwa “baik” adalah objek keinginan dan “buruk” adalah objek penolakan. Setiap individu adalah makhluk rasional yang akan menggunakan segala usaha untuk memperoleh keinginannya dalam mempertahankan hidupnya. Tindakan manusia adalah gabungan rasio dan keinginan dalam bentuk nafsu dan pergelakan untuk mencapai tujuan melalui kekuasaan. Kekuasaan diperoleh melalui konflik manusia membutuhkan masyarakat (Organisasi) sepanjang hidup, manusia membantu orang lain untuk bertahan hidup dan saling melengkapi, namun alasan lainnya untuk kepentingan egoistisnya. Hobbes menjelaskan bahwa “Perjanjian tanpa pedang akan sia-sia saja”. Semua hubungan sosial antar manusia bersifat buatan, yang berarti bahwa hubungan mereka adalah hasil dari perhitungan dan persetujuan. Dalam arti hubungan sosial hanya bersifat “eksternal” bagi individu dan bukan bagian dari kesepahaman moral bersama.

3. Adam Smith

Adam Smith dalam Teori EGOIS dan STRUKTUR SOSIAL (Campbell, 1981)

Adam Smith mengikuti Hobbes, bahwa setiap manusia lebih mementingkan dirinya sendiri (egois) dari pada kepentingan orang lain. Menurutnya, sentimen menimbulkan aturan sosial yang mengarahkan kepentingan diri, mengendalikan keegoisan dan mendorong kemurahan hati yang alamiah dan oleh karena itu, maka kehidupan sosial (interaksi dalam organisasi) di dasarkan pada konsensus. Hidup di dalam masyarakat (organisasi) berarti hidup bersama dalam kedamaian agar terhindar dari kematian serta melakukan kegiatan ekonomi untuk mempertahankan hidupnya. Dengan adanya keadilan agar tidak terjadinya konflik atau melukai dalam masyarakat. Dalam hal ini Smith lebih mengedepankan hubungan ekonomi, sebab dari hubungan ekonomi tersebut maka timbul organisasi masyarakat. Yaitu dari keinginan manusia untuk mencapai kesejahteraan material yang diawali dari mempertahankan hidupnya dan selanjutnya ingin di hormati oleh sesamanya, merupakan penyebab munculnya struktur sosial dan perubahan sosial.

4. Karl Marx

Karl Marx dalam Teori HUBUNGAN, PERUBAHAN SOSIAL, dan KELAS (Campbell, 1981) Pendekatan holistik Marx (1818- 1883) mengungkapkan bahwa manusia tidak memiliki kodrat yang sama dan tetap, melainkan hanya bersifat sosial. Hubungan sosial terjadi sebab usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengubah lingkungan material melalui kegiatan produksinya. Pada awalnya hubungan sosial dipengaruhi oleh perbedaan- perbedaan alamiah antar manusia berdasarkan kekuatan, ukuran, tenaga, dan kemampuan. Namun, diawali dengan struktur ekonomi masyarakat, pembagian kerja yang mengharuskan adanya suatu sistem pertukaran. Proses sosial ini menimbulkan perbedaan dalam pemilikan atau kontrol terhadap sumber- sumber alam dan alat-alat produksi. Penyebaran alat produksi melalui perkembangan teknologi merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Kelas majikan kapitalis (borjuis) dan kelas buruh proletariat. Perjuangan antar kelas akan terjadi yang mana kelas borjuis mewakili kepentingan sendiri, sedangkan kelas proletar, dalam pandangan utopis Marx, berjuang atas nama umat manusia (Lawang, 1986).

5. Emile Durkheim

Emile Durkheim dalam Teori INDIVIDUALISME dan KOLEKTIVISME (Campbell, 1981). Polaritas individualisme dan kolektivisme adalah pandangan yang selalu hadir dalam karya Durkheim (1858-1917). Polaritas di hadirkan oleh karena keprihatinannya terhadap tatanan sosial dan pemenuhan diri manusia. Individualisme dan perbedaan individu dan otonomi pribadi dapat ditemui dalam versi sindikalisme dari sosialisme dan non-revolusioner, di mana individu dilindungi negara dalam posisinya sebagai anggota kelompok jabatan. Ia memandang bahwa kodrat manusia sebagai abstraksi total tingkah laku manusia yang realistis. Masyarakat adalah sebuah tatanan moral yaitu tuntunan normatif (kenyataan ideal) dan bukan kenyataan material. Masyarakat terbagi menjadi 2 pertama masyarakat sederhana dan kompleks, dan yang kedua masyarakat solidaritas sosial (mekanis dan organis).

6. Max Weber

Salah satu pemikiran yang muncul dari Max Webber ialah tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan suatu perilaku, perbuatan seorang individu atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan dirinya. Tindakan tersebut juga bisa dilakukan secara berkelompok, sehingga memberikan pengaruh bagi lingkungannya. Max Webber mengatakan bahwa tindakan sosial adalah sebuah tindakan manusia yang dapat memengaruhi individu- individu lain yang ada dalam masyarakat. Dalam karyanya mengatakan bahwa kenyataan sosial lahir tidak terlepas dari pemahamannya tentang motivasi seseorang dan tindakan sosial. Tindakan sosial yang dimaksud oleh Max Webber ialah tindakan yang dilakukan seorang individu memiliki sebuah makna dan tujuan bagi dirinya.

7. Alfred Schutz

Cara memaknai realitas sosial menurut Alfred Schutz adalah dengan tipifikasi. Tipifikasi adalah mencari klasifikasi berdasarkan kategori tertentu yang berelasi dengan kemungkinan orang memaknai suatu realitas simbolik. Dalam konteks ini, tipifikasi tersebut adalah membagi informan ke dalam 2 buah posisi yang saling diametral. Kumpulan pengetahuan yang sifatnya praktis yang hadir dalam masyarakat (tertentu), tidak dengan sendirinya diserap.

HASIL

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan **Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita Di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat** merupakan penelitian yang cukup banyak diambil oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka peneliti menyertakan beberapa penelitian sebelumnya untuk perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Jessyca Azzahra (2021). penelitian ini berjudul **Implementasi Kebijakan 5 Pilar Penurunan Stunting Dan Faktor Yang Mempengaruhi Di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok**. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori Aristoteles. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting secara

signifikan belum mampu menurunkan jumlah penderita stunting. Hasil ini, relevan dengan penelitian yang mengungkap belum optimalnya capaian kebijakan penurunan stunting. Misalnya, disebabkan karena masih rendahnya koordinasi dan kerjasama antar OPD (Febrian & Yusran, 2021) Belum optimalnya pelaksanaan konvergensi kebijakan (Iqbal dan Yusran, 2021) dan terjadinya perubahan orientasi fungsional antara kebijakan pangan, ekosistem lingkungan yang berpengaruh pada kejadian stunting (Yusran, 2021)

Penelitian kedua, dilakukan oleh Khairah Annisa (2021). penelitian ini berjudul **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teori Aristoteles. berdasarkan temuan lapangan, tidak hanya karena pandemi covid-19, terdapat beberapa faktor penghambat lain nya dalam upaya pemerintah menurunkan angka stunting di Kabupaten Solok. Pertama, rendahnya komitmen dan kerjasama OPD yang ada di Kabupaten Solok. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, yang bergerak dalam pemenuhan gizi spesifik. Dalam proses pengambilan data atau yang menentukan anak stunting adalah dari Dinas Kesehatan. Pengambilan data melalui bidan nagari yang bertanggung jawab di puskesmas setempat. Pengambilan data mulai dari menimbang berat badan, mengukur tinggi, mengukur lingkaran kepala, dan mengukur lengan badan yang dilakukan oleh tenaga profesional dan paham indikator anak kategori stunting. tanggung jawab yang seharusnya di emban oleh tenaga lapangan yang profesional, malah di ambil alih oleh beberapa kader posyandu. Kader yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai indikator penetapan anak stunting mengakibatkan data menjadi tidak valid dilapangan. Kesalahan dalam pengukuran dan menginput data yang salah menyebabkan anak yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus menjadi tidak tepat sasaran. Belum lagi alat ukur yang tingkat keakuratannya masih sangat rendah.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Rahmadani Yusran (2022). penelitian ini berjudul **Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Kota Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teori Aristoteles. Implementasi pencegahan yang diinginkan. Adapun dampak kegiatan dapat dilihat dari dampak stunting di Nagari Pulakek Koto Baru yang ditimbulkan atas pelaksanaan Solok Selatan belum terlaksana sesuai kebijakan tergambar dan terlihat PerMenKes RI No 14 Tahun 2019 apa perubahannya. Kemudian, mengenai Penyelenggaraan Teknis evaluasi dapat memberikan penilaian Surveilans Gizi. Hal ini dikarenakan mengenai sejauh mana kebijakan implementasinya belum sesuai tersebut telah terlaksana dan dinilai dengan tujuan kebijakan. Hal ini berdasarkan kriteria yang telah dilihat dari belum optimal ditentukan (Winarno (2014). pelaksanaan pencegahan stunting. Dengan demikian, evaluasi melalui program surveilans Gizi adalah suatu tahapan kebijakan yang dilihat dari masih kurangnya tingkat menggambarkan keberhasilan kerja partisipasi masyarakat untuk datang dan penelitian atas suatu kebijakan ke posyandu dan masih rendahnya yang telah dilaksanakan. Dimana tingkat pengetahuan ibu balita tujuan awal evaluasi tersebut adalah tentang pola asuh yang baik dan agar masalah dalam pelaksanaan benar. Kemudian, kurangnya implementasi bisa segera ditemukan konsistensi pemerintah daerah dalam dan diselesaikan dengan solusi yang pencegahan peningkatan kejadian tepat guna perbaikan bagi kebijakan stunting.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Yulfira Media dan Nilda ELfemi (2021). penelitian ini berjudul **Permasalahan Sosial Budaya Dan Alternatif Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita Di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teori Aristoteles. Dalam artikel ini menunjukkan beberapa alternatif arah kebijakan dan rencana aksi dalam upaya pencegahan stunting pada balita adalah: 1. Optimalisasi peningkatan pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan stunting. Beberapa alternatif kegiatan yang diusulkan, yaitu peningkatan sosialisasi dengan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat melalui pelaksanaan kegiatan posyandu, opyimalisasi penyuluhan tentang stunting secara langsung kepada masyarakat, peningkatan sosialisasi tentang resiko anak stunting terhadap kecerdasan kepada masyarakat; 2. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan potensi sosial budaya lokal yang mendukung perilaku sadar gizi.

PEMBAHASAN

Pengertian kebijakan penanggulangan stunting pada balita

Kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dalam berbagai interaksi yang berlangsung. Penurunan stunting merupakan permasalahan mendesak dan menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Sebab, jumlah penderita stunting memperlihatkan jumlah yang signifikan dan belum menunjukkan adanya penurunan yang pasti. Oleh karena itu, analisis penanggulangan stunting pada balita dapat dijadikan sebagai pijakandalam menjelaskan sejauh mana upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mewujudkan capaian kebijakan.

Tujuan penanggulangan stunting pada balita

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 tentang Renvan Kerja Pemerintah tahun 2019 menjelaskan bahwa program kerja kegiatan penurunan stunting telah menjadi salah satu kegiatan prioritas nasional. Untuk itu organisasi pemerintah daerah yang ada di daerah kabupaten/kota bersama-sama menanggulangi stunting. Baik dari intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif.

Kabupaten Solok telah menjadi fokus pemerintah dalam penanganan stunting sejak 2019. Kegiatan yang dilakukan mulai dari sosialisasi tentang gizi dari pihak dinas kesehatan Kabupaten Solok dilaksanakan yang menjadi fokus stunting (Dinas Kesehatan, 2019).

Tujuan dari pengaturan pelaksanaan teknis surveilans gizi:

- 1) Memberikan pedoman terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga pelaksana program gizi guna mendukung pencapaian program perbaikan gizi
- 2) Menata penyelenggaraan surveilans gizi di seluruh tingkatan pemerintahan
- 3) Mendeskripsikan secara menyeluruh tentang permasalahan gizi dan pencapaian indikator kinerja gizi

Cara Kerja penanggulangan stunting pada balita

Menurut peraturan pemerintah

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang penurunan stunting. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Solok No. 35 Tahun 2019, maka ditetapkan 5 pilar penurunan yaitu:

- 1) Komitmen dan visi pimpinan daerah
- 2) Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas
- 3) Konvergensi, koodinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat
- 4) Akses pangan bergizi dan keamanan pangan
- 5) Pemantauan dan evaluasi

Menurut pada penelitian

Alternatif kegiatan yang dapat dilakukan:

- 1) Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat terutama terkait peningkatan pola asuh keluarga terhadap anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam bentuk pelatihan pembuatan makanan pendamping ASI yang berkualitas baik melalui kegiatan posyandu dan PKK
- 2) Penerapan modn intervensi pencegahan dan penanggulangan stunting melalui praktek pembuatan produk dan penerapan PMT balita dengan memanfaatkan bahan pangan lokal seperti daging dan ikan
- 3) Optimalisasi pemanfaatan dana desa melalui rehabilitasi poskesdes, polinde, dan posyandu, konseling dan penyediaan makan sehat untuk peningkatan gizi balita, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, penyediaan sumber air bersih dan MCK

- 4) Peningkatan peran kader kesehatan dan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan kader kesehatan tentang pemantauan status gizi balita melalui pelatihan tentang pengukuran berat badan dan panjang atau tinggi badan.

Faktor-faktor stunting pada balita

Faktor penghambat

- a. Rendahnya komitmen dan kerjasama organisasi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Solok
- b. Pola pikir masyarakat yang masih rendah dan sulit diubah
- c. Keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran yakni keterbatasan pelayanan kesehatan, ahli gizi dan penyuluhan lapangan dalam intervensi gizi
- d. Kurangnya inovasi dari organisasi pemerintah daerah atau lembaga terkait penanggulangan stunting pada balita

Faktor pendukung

- a. Adanya kebijakan daerah yang dapat dijadikan sebagai pedoman penurunan stunting
- b. Ketersediannya sumber daya manusia yang memadai pelaksanaan kampanye penurunan stunting
- c. Dukungan pemerintah daerah maupun pusat

KESIMPULAN

Kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Solok Sumatera Barat merupakan bagian penting dari upaya mengurangi penderita stunting pada balita yang jumlahnya mencapai sebesar 36,2% lebih tinggi dari prevalensi nasional yaitu 35,3%. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dari upaya pencegahan stunting di Kabupaten Solok Sumatera Barat masih belum mencapai titik keberhasilan dilihat masih belum maksimal maka dari itu dibuatlah peraturan. Berikut ini yang dibuat oleh pemerintah yaitu menerapkan peraturan yang sudah di buat yaitu Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting. Dalam hal ini pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan kelembagaan yang memiliki peranan strategi. Pemerintah perlu memperkuat dukungan sumberdaya manusia dan anggaran yang memadai melalui kebijakan tertentu.

Alternatif kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan stunting yang diusulkan dengan memanfaatkan potensi lokal adalah optimalisasi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan stunting antara lain melalui peningkatan sosialisasi tentang risiko anak stunting terhadap kecerdasan kepada masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan potensi sosial budaya lokal yang mendukung perilaku sadar gizi antara lain dengan pelatihan pembuatan makanan pendamping ASI yang berbasis pangan lokal.

Terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan pemerintah agar upaya penanggulangan stunting pada balita berikut ini beberapa alternatif kebijakannya, yaitu: 1. Optimalisasi peningkatan pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan stunting antara lain peningkatan sosialisasi untuk pencegahan stunting melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, 2. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan potensu sosial budaya yang mendukung sadar gizi, melalui kegiatan pelatihan pembuatan makanan pendamping ASI yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridiyah, F. O., Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan. *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 3(1).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2013). Laporan Riset Kesehatan Dasar 2013. *Badab Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*
- Bungin, B. (2010). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana.
- Niga, D. M., & Purnomo, W. (2016). Hubungan Antara Praktik Pemberian Makan, Perawatan Kesehatan, Dan Kebersihan Anak Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 1-2 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Oebobo Kota Kupang. *Wijaya*, 3(2), 151–155
- Febrian & Yusran. 2021. Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 3, 11–21.
- Iqbal dan Yusran. 2021. Upaya Konvergensi kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 3.
- Kementerian Kesehatan Republic Indonesia. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Upaya Perbaikan Gizi*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: CAPS
- Islamy, M. I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementrian Kesehatan RI. (2018). *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Jakarta.
- Kementrian PPN/Bappenas. (2018). *Pedoman Pelaksana Intervensi Penurunan Stunting Terintegritas di Kabupaten/Kota*. Jakarta
- [4130-Article Text-35895-1-10-20210629_2.pdf](#)
- [661-Article Text-2424-1-10-20220412.pdf](#)
- [33-Article Text-243-1-10-20221014.pdf](#)
- [32-Article Text-244-1-10-20221014.pdf](#)